

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. (Kiryanto, 2007:6)

Bank memiliki fungsi intermediasi yaitu sebagai perantara bagi masyarakat yang memiliki surplus dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang mengalami defisit dana (Saut Timbul, 2002:1). Salah satu kegiatan usaha bank adalah menyalurkan kredit. Secara etimologis kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" atau "*credo*" yang berarti kepercayaan (Usman, 2001:36). Adapun yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan)

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Adapun prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit adalah prinsip 5”C” yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic* (Jumingan, 2006: 223). Menurut Tribune (2007) dari kelima prinsip tersebut *collateral* (jaminan) merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan pemberian kredit karena permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan adalah resiko kredit macet (resiko tidak tertagihnya kredit) dengan adanya jaminan yang tinggi berarti resiko adanya kredit yang macet menjadi lebih rendah.

Menurut Dewi (2009), strategi pemberian kredit merupakan salah satu fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab menurunnya pendapatan suatu bank. Dimana semakin tinggi rasio *Net Profit Loan* (NPL) suatu bank maka akan mengurangi pendapatan suatu bank dikarenakan banyaknya debitur yang menunggak pembayaran kredit. Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Karena itu dalam upaya mengatasi tingginya NPL, pihak bank semakin tajam menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan resiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Informasi tentang calon debitur merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat resiko yang bakal dihadapi bank.

Penentuan *eligible* atau *bankable* tidaknya seseorang atau suatu perusahaan tergantung seberapa banyak informasi akurat yang dimiliki bank tentang calon debitur.

Menurut Silitonga (2009) aktivitas kredit adalah aktivitas yang dominan, hal ini dapat diketahui pada neraca suatu bank yang memperlihatkan persentase kreditnya terbesar dibandingkan dengan seluruh aktiva. Dominasi tersebut menyebabkan pendapatan bunga (*interest income*) merupakan pendapatan yang menonjol dari seluruh pendapatan bank. Di sisi lain kredit memiliki tingkat resiko yang tinggi sehingga kerugian mungkin dapat terjadi, misalnya kredit macet dan likuidasi. Oleh karena itu Bank harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. Bank harus menghindarkan terjadinya tunggakan bunga dan tidak meningkatnya beban biaya bank sehingga dapat menekan atau bahkan menghapus profitabilitas bank.

Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik usaha kecil maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Salah satu masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah. Masalah permodalan yang dihadapi mencakup aspek-aspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. (Mega, 2008:12)

Saat ini permodalan UKM, bukan hanya program pemerintah ataupun pembiayaan melalui lembaga keuangan. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh UKM adalah melalui program kemitraan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dananya bersumber pada keuntungan (laba) yang diperoleh oleh BUMN itu sendiri. Pembiayaan yang dilaksanakan melalui program kemitraan oleh BUMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. (Widya Siska, 2009:5).

Wardoyo (2001) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah kredit usaha mikro, sehingga Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. (Retnadi, 2008:13).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur KUR Retail dan debitur KUR mikro menunjukkan dampak yang positif karena *pertama*, koperasi dan UMK memanfaatkan KUR dengan baik untuk mengembangkan usaha, pemilihan debitur KUR yang selektif oleh petugas bank melalui pengawasan dan pembinaan bank sebagai pelaksana program KUR untuk peningkatan dan perkembangan usaha debitur dan kesadaran yang tinggi oleh UMK akan kewajiban pengembalian pinjaman. *Kedua*, terjadi peningkatan pendapatan, volume penjualan dan jumlah produksi UMKM. *Ketiga*, bagi koperasi, memberikan dampak terhadap peningkatan aspek manajemen, kinerja usaha, partisipasi anggota dan pelayanan terhadap anggota. *Keempat*, persentase kenaikan dampak pada usaha mikro lebih besar dibanding usaha kecil, koperasi dan UMK. Kelima, KUR merupakan pinjaman menguntungkan dengan beban bunga yang murah. (Djohari, 2009:3)

Bank melakukan pengawasan dalam langkah *approach* serta bimbingan terhadap debitur artinya melakukan pengawasan kredit sekaligus mengadakan *approach* serta bimbingan dalam rangka membina debitur. Debitur perlu dibina agar usahanya maju dan berkembang sehingga ia akan memenuhi kewajibannya secara baik. Hal ini berarti memperlancar jalan pencapaian reabilitas bank dan amannya fasilitas bank.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kurniawan (2008) membuktikan bahwa masih banyak pelaku UMKM tidak menggunakan dana pinjaman KUR sepenuhnya untuk kegiatan usahanya, para pelaku

UMKM masih sering menggunakan dana KUR untuk kegiatan konsumtif, sehingga dapat dikatakan bahwa program KUR ini masih belum memenuhi sasaran dan tujuan awal untuk meningkatkan kegiatan usahanya, dengan adanya faktor penyalahgunaan dana KUR tersebut, menyebabkan program KUR yang ditujukan pada UMKM kurang efektif. Dengan demikian perlu adanya kerja sama dari pemerintah dan pihak bank untuk melakukan evaluasi dan seleksi dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan mengontrol langsung kegiatan nasabah dilapangan.

Wardhani (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa dalam pemberian kredit pihak bank harus melalui beberapa tahap mulai dari permohonan kredit, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian keputusan dan tahap akad kredit/ pencairan kredit, hal itu merupakan upaya dalam mengurangi timbulnya kredit bermasalah. Selain itu pihak bank juga melakukan evaluasi kredit, jika terjadi kredit bermasalah dengan pengajuan klaim ke Askrido sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah, sedangkan perbankan bertindak sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pembaharuan penelitian ini terletak pada peningkatan usaha debitur dalam mengembangkan usahanya, terbukti dari peningkatan volume produksi, pendapatan serta keuntungan yang didapat setelah menerima kredit khususnya KUR Mikro dari bank. Dikatakan meningkat diketahui

setelah bank yang menyalurkan tersebut melakukan pengawasan melekat pada debitur dan pembinaan khusus terhadap debitur terkait dengan memantau langsung ke lapangan sehingga dapat diketahui efektif atau tidak dana yang disalurkan oleh bank tersebut.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) adalah salah satu bank yang mengikuti program ini. Program pertama yang dikeluarkan BRI adalah menyalurkan KUR dengan plafon dibawah Rp 500 juta. Akan tetapi, sejak pertengahan bulan februari 2008, BRI telah menciptakan produk khusus untuk melayani nasabah dengan plafon dibawah Rp 20 juta. (www.kompas.com). Perkembangan BRI dan konsistensi memberikan kredit kepada rakyat pedesaan membuat bank ini dijuluki *micro banking*-nya Indonesia. Produk bank ini yang sangat terkenal yaitu kupedes dan simpedes. Walaupun demikian, BRI mempunyai kegiatan melayani nasabah dalam penyimpanan dan pinjaman yang dapat dikelompokkan dalam 3 Skim yaitu *pertama*, KUR Ritel dengan Plafond kredit > Rp 20 juta s.d Rp 500 juta dan dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. *Kedua*, KUR Mikro dengan Plafond kredit s.d Rp 20 juta dan dilayani di BRI Unit. *Ketiga*, KUR Linkage dengan BKD, KSP/USP, BMT, dan LKM lainnya dan dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dengan plafond > Rp 20 juta s.d Rp 500 juta. Pinjaman LKM ke *end user* maksimal Rp 20 juta. (haymans ,2008:74).

Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) sepanjang Januari hingga Juni 2011 mencapai Rp 8, 67

triliun. Jumlah tersebut setara 86,7% dari target pemerintah hingga akhir 2011 ini yang sebesar Rp 10 triliun. Direktur Utama BRI, Sofyan Basir mengatakan, ekspansi KUR ini terbilang besar dibandingkan kredit lain di segmen sejenis. Pasalnya, KUR fokus pada kelompok mikro, sehingga bisa banyak terserap. Peranan KUR dalam meningkatkan peluang usaha telah terbukti, manfaatnya juga telah banyak dirasakan oleh kalangan UMKM. (keuangan.kontan.co.id).

Untuk realisasi KUR BRI per 23 desember 2011, sebesar Rp16,5 triliun atau 165,4 persen dari target realisasinya sementara realisasi KUR untuk 13 BPD pada periode yang sama adalah sebesar Rp3,57 triliun atau 129,8 persen dari target realisasinya (Intan Permatasari, 5 januari 2012). Program KUR dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran ini tentunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu indikator keberhasilan program tersebut tentunya adalah meningkatnya pendapatan usaha dan keuntungan dari UMKM tersebut. Akan tetapi bukan tidak mungkin program ini akan meleset dari tujuan semula jika tidak dijalankan dengan baik dan kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, bank penyalur KUR dan UMKM sendiri.

KUR diharapkan akan mampu mengatasi masalah yang melingkupi perkembangan UMKM yakni prosedur yang berbelit-belit serta jaminannya. Pada program KUR ini pengelola usaha mikro kecil dan menengah dapat meminjam modal hanya dengan jaminan kelayakan usaha.

Permasalahannya, prosedur pelaksanaan pemberian kredit untuk pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah tidak mudah. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditur dan petugas bank terkesan memilih-milih nasabah yang akan diberi kredit. Di sisi lain tindakan petugas bank tersebut dilakukan karena sebagian besar debitur dalam menggunakan uangnya sering menyimpang dari alasan saat pengambilan kredit, yaitu debitur menggunakan uang untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan usahanya, dengan demikian Peneliti berusaha untuk mengevaluasi program KUR yang merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Serta pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan tujuan semula.

Alasan peneliti memilih Bank BRI unit Buring karena Bank BRI merupakan salah satu bank BUMN yang dipilih oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Bank BRI memiliki program kredit diantaranya pemberian Kredit kepada usaha kecil, mikro dan menengah dalam program kredit usaha rakyat (KUR). Perkembangan realisasi KUR pada bank unit ini baik, sehingga resiko kredit macet yang terjadi pun dapat dikendalikan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan terhadap debiturnya. Melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha debitur sehingga mengurangi penyimpangan dana KUR oleh debitur. Selain itu juga, Bank BRI terkenal karena pengalamannya yang cukup lama dalam memberikan kredit mikro

dikarenakan oleh penyebaran unit-unit BRI keseluruh pelosok tanah air yang menyalurkan kredit, namun belum diketahui seberapa besar sebenarnya efektifitas dari kredit usaha rakyat tersebut dan kinerja UMKM yang selama ini mendapatkan pinjaman KUR tersebut menjadi lebih baik dibandingkan kinerja sebelum mendapatkan kredit, sehingga perlu adanya evaluasi dari semua pihak dalam memberikan kredit usaha rakyat tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENGARUH EFEKTIFITAS, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN KREDIT TERHADAP PENINGKATAN USAHA (Studi pada Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Buring Malang) ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh efektifitas, pengawasan dan pembinaan kredit terhadap peningkatan usaha Debitur KUR Mikro?
2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap peningkatan usaha Debitur KUR Mikro?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh efektifitas kredit, pengawasan kredit dan pembinaan kredit terhadap peningkatan usaha debitur KUR Mikro .
2. Untuk mengetahui Variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan usaha debitur KUR Mikro.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Peneliti,
 - a. Menambah wawasan keilmuan dan pemahaman tentang manajemen perkreditan, analisis kredit, dan evaluasi kredit mencakup pengawasan dan pembinaan kredit.
 - b. Sebagai media pengaplikasian teori yang di dapat dalam perkuliahan.
2. Masyarakat,

- a. UMKM

Hasil penelitian ini Untuk memberikan berbagai macam hal yang terkait dengan kredit usaha rakyat salah satunya yaitu informasi tentang KUR serta prosedur KUR agar lebih mudah dalam memperoleh pinjaman KUR.

- b. Umum

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang kredit usaha rakyat di bank BRI mulai dari prosedur hingga evaluasi kredit usaha

rakyat. Sebagai alternatif jika akan melakukan kredit untuk usahanya.

3. Pihak bank

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan dan alternatif dalam mengevaluasi program KUR mulai dari informasi KUR, prosedur pemberian KUR hingga efektifitas program KUR.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya fokus meneliti peningkatan usaha debitur melalui program pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) yang meliputi efektifitas KUR, Pengawasan KUR serta Pembinaan pada bank BRI serta perkembangan usaha debitur yang menerima kredit KUR.